

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, Pariwisata menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian pemerintah (Hemas dan Asnawi: 2013). Berbagai daerah kini mulai memperhatikan pengelolaan pariwisata, seperti sarana dan prasarana menuju lokasi, hingga melakukan promosi menggunakan sosial media untuk menarik wisatawan berkunjung. Pertumbuhan pesat pariwisata tidak lepas dari perhatian pemerintah pusat dan daerah dalam menggalakkan otonomi daerah dengan memaksimalkan potensi lokal. Ismayanti (2010) mengatakan bahwa Pariwisata merupakan fenomena yang terjadi karena adanya interaksi antara wisatawan, penyedia jasa dan pemerintah dalam mendukung kegiatan wisata. Interaksi tersebut membentuk suatu sistem yang saling terhubung satu sama lain, dimana setiap sektor saling mendukung satu sama lain.

Disebutkan dalam Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan menyebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sedangkan wisata itu sendiri memiliki definisi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan berkunjung suatu tempat dengan tujuan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu. Selaras dengan yang disebutkan di atas, pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang mampu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga setiap daerah kini berlomba-lomba untuk mengembangkan pariwisata dan mengoptimalkan potensi lokal daerah tersebut.

Peningkatan jumlah pariwisata yang dikelola secara baik akan menyebabkan adanya efek domino di sekitar lingkungan tersebut. Secara esensial ketika obyek wisata tersebut ramai dikunjungi oleh wisatawan, tentunya akan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Interaksi yang timbul antara wisatawan dan pengelola wisata memunculkan iklim ekonomi yang saling

menguntungkan karena adanya *supply* dan *demand* saling membutuhkan. Maka, diperlukan pengelolaan yang baik dari pariwisata tersebut, agar mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah sebagai pemegang kebijakan dapat juga melakukan kontrol di daerah masing-masing untuk menjamin kemajuan daerah tersebut. Menurut Adam Smith dan Richard, Pemerintah Daerah memiliki empat fungsi, diantaranya pengaturan, pelayananan, pembangunan dan pemberdayaan. Pengembangan sektor pariwisata termasuk dalam fungsi pemberdayaan, dengan tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan perkonomian.

Kebumen merupakan kabupaten yang terletak di pesisir pantai selatan. Kabupaten Kebumen memiliki potensi pariwisata yang begitu beragam. Kekuatan potensi lokal daerah menjadi kekuatan Kebumen untuk mengembangkan pariwisata. Adapun beberapa potensi seperti pantai, bukit, goa, adat istiadat dan makanan khas. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026, telah dibagi beberapa lokasi potensi wisata dan *geopark* sebagai prioritas pengembangan potensi lokal. Pesisir pantai selatan Kebumen, difokuskan untuk pengembangan wisata pantai dan *geopark*. Pantai yang dimaksud seperti Pantai Ayah, Menganti dan Suwuk, sedangkan Karanbolong-Karangsambung menjadi lokasi *geopark* yang menjadi fokus pengembangan.

Selain berfokus kepada pengelolaan dan pengembangan pariwisata, Kabupaten Kebumen jugamemiliki banyak desa yang memiliki potensi untuk di jadikan Desa Wisata. Optimalisasi pengembangan pariwisata melalui desa wisata menjadi salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dan sosial budaya. Mengapa demikian? Karena setiap desa memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi lokal seperti keadaan sosial dan budaya yang diyakini di kalangan masyarakat. Secara esensial desa wisata merupakan pengembangan desa dengan memanfaatkan unsur-unsur yang terdapat di masyarakat sebagai ciri khas atau produk wisata yang menjadi karakteristik desa. Ketika berbicara desa wisata, maka desa tersebut harus mampu menampilkan keaslian kehidupan pedesaan dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, adat keseharian masyarakat desa,

bangunan desa yang memiliki ciri khas tertentu, serta kegiatan lain yang memberikan keunikan desa yang tidak dimiliki oleh desa lainnya.

Desa Sendangdalem terletak di Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Desa Sendangdalem memiliki potensi wisata dari kearifan lokal yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun beberapa potensi wisata Desa Sendangdalem diantaranya *River Tubing* Sendangdalem, Waduk Wadaslintang, *Camp Area*, adat istiadat dan makanan tradisional. Kebudayaan atau adat istiadat di Sendangdalem masih sangat dipegang teguh oleh masyarakat, seperti upacara adat, tarian tradisional hingga rumah tradisional masih terjaga dan dirawat. Selain itu, makanan tradisional juga tidak kalah menarik diantaranya Sumpil, Gatot, Mendoan dan beberapa jenis makanan khas daerah Kebumen. Keindahan alam Desa Sendangdalem yang meliputi terasering sawah, *river tubing* dan tradisinya mejadi kekuatan utama untuk menarik wisatawan berkunjung. Berdekatan langsung dengan Waduk Wadaslintang membuat pasokan air untuk kegiatan *river tubing* terjamin ketersediaannya. Potensi lokal yang dimiliki seperti adat istiadat, makanan khas dan tradisi daerah menjadi salah satu kebanggaan masyarakat setempat untuk mengembangkan desa wisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, Desa Sendangdalem sudah menjadi salah satu desa wisata di Kabupaten Kebumen. Desa Wisata disebutkan sebagai bentuk integrasi yang di dalamnya terdapat atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu stuktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara tradisional yang berlaku. Di dalam desa wisata terdapat dua komponen penting, (1) Akomodasi yaitu sebagian tempat tinggal dari penduduk setempat menjadi penunjang kegiatan desa wisata. (2) Atraksi yaitu kegiatan masyarakat desa setempat diusahakan untuk dapat berinteraksi dengan wisatawan, dan memberikan pelayanan atau memberikan wawasan kepada wisatawan mengenai adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat. Seperti yang telah disebutkan diatas, desa wisata menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, diperlukan adanya keterlibatan masyarakat lokal dalam proses tersebut. Karena masyarakat lokal yang paling memahami keadaan dan sumber keunikan tradisi, serta budaya yang melekat dikalangan masyarakat.

Pengelolaan Desa Wisata Sendangdalem saat ini dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Dalam hal ini, pokdarwis bertanggungjawab secara penuh terhadap keberlangsungan Desa Sendangdalem. Pemerintah desa memiliki peran sebagai pengawas dan pendamping serta memberikan saran kepada pokdaris mengenai pengembangan desa wisata. Desa Wisata Sendangdalem menawarkan paket wisata yang menarik, seperti *river tubing*, *camp area*, penginapan, makanan khas, kearifan lokal, hingga kebun hortikultura yang memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk memetik sendiri. Pada 2021, desa wisata sendangdalem mendapatkan penghargaan sebagai sepuluh desa wisata potensial di Jawa Tengah dalam perlombaan desa wisata nasional yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf.

Yumanraya (2014) menyebutkan bahwa dalam mengelola desa wisata terdapat tantangan tersendiri terutama dalam prosesnya. Pergeseran pengelolaan di dalam desa wisata yang tadinya hanya berorientasi kepada hasil, yang kemudian digeser menjadi lebih terstruktur tentunya akan terjadi *culture shock* dikalangan masyarakat. Potensi wisata yang dimiliki, seharusnya dikelola dengan baik, agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat sebagai aktor utama memiliki posisi strategis untuk mengembangkan desa wisata dengan kemampuan masyarakat lokal sendiri, pemberdayaan, berkelanjutan, konservasi dan peningkatan budaya untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk (Andrea dan Janet, 2012:176). Kolaborasi pemerintah dengan masyarakat dalam mengelola desa wisata sangat diperlukan, dalam hal ini masyarakat sebagai aktor utama dan pemerintah sebagai pengawas dan pemberi regulasi.

Perkembangan desa wisata yang begitu pesat, tentunya ada menjadi salah satu kabar gembira. Karena, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat dari pendapatan yang diperoleh dari desa wisata. Tetapi, tidak semua desa wisata yang berhasil. Hemas dan Asnawi (2013) menyebutkan salah satu keberhasilan dalam mengelola desa wisata adalah pemberdayaan masyarakat, keunikan lokasi, tokoh penggerak dan keterlibatan masyarakat. Faktor-faktor tersebut juga dikuatkan oleh Joko Tri Harnyato (2013) yang menyebutkan bahwa masyarakat sebagai pusat pengembangan pariwisata menjadi salah satu kunci sukses pengelolaan desa wisata. Implementasi dari nilai-nilai budaya, sosial dan lingkungan di desa wisata menjadi

kekayaan utama suatu desa wisata untuk menarik wisatawan (Joko Tri Haryanto, 2013:110).

Kemajuan teknologi di bidang media sosial, menjadi peluang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Desa Wisata Sendangdalem. *Instagram, tiktok, youtube* merupakan platform yang sangat sering dikunjungi dan digunakan oleh masyarakat. Bagaimana dengan Desa Wisata Sendangdalem? Saat ini media sosial yang digunakan oleh Desa Wisata Sendangdalem meliputi *instagram, tiktok, facebook dan youtube*. Secara kuantitas dapat dikatakan memenuhi seluruh media yang saat ini sering digunakan oleh masyarakat. Tetapi pada prakteknya media tersebut belum dikelola secara masif untuk menarik pengunjung ke Desa Wisata Sendangdalem. Kurangnya pemanfaatan media dengan baik oleh pokdarwis menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pengunjung ke desa wisata belum terlalu banyak, dibandingkan dengan desa wisata lain di Jawa Tengah. Dapat dilihat di Instagram pengikut baru 188 dengan jumlah postingan delapan, youtube dengan 146 subscriber dengan jumlah video 37 video dan tiktok 406 pengikut dengan 43 video. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pokdarwis belum mampu memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk menarik media sosial. Branding yang menarik akan berbanding lurus dengan jumlah wisatawan yang berkunjung, karena di era teknologi, visualisasi mampu menjadi daya tarik para wisatawan untuk mengunjungi desa wisata atau tempat wisata.

Selain masih minimnya penggunaan media sosial dalam branding desa wisata, permasalahan lain yaitu peran masyarakat sebagai aktor utama dalam pengembangan desa masih minim. Pengelolaan yang masih berfokus kepada pokdarwis menyebabkan minimnya kontribusi masyarakat. *“Masyarakat desa hanya terlibat kalau ada upacara atau undangan saja, tetapi kalo untuk terlibat langsung dalam desa wisata masih dipegang oleh pokdarwis”* (Wawancara Kamin, tanggal berapa). Lebih lanjut, dengan adanya keterbatasan dari masyarakat, mereka belum merasakan secara nyata dampak dari Desa Wisata Sendangdalem. Padahal, potensi yang dimiliki Desa Sendangdalem apabila dikelola secara bersama dapat menghasilkan suatu desa wisata potensial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal utama yang terlihat yaitu dari segi ekonomi. Mengapa demikian? Dengan adanya efek domino dimana meningkatnya jumlah

wisatawan maka akan berbanding lurus dengan kebutuhan seperti, tempat singgah, tempat makan, pemandu wisata dan lain-lain. Tentu, hal tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan penelurusan penulis, setelah berdiskusi dengan pemerintah desa, pokdarwis dan masyarakat. Terdapat perbedaan pandangan yang disampaikan oleh pokdarwis dan masyarakat. Pertama, dari sudut pandang pokdarwis mengatakan bahwa pemerintah desa kurang memperhatikan pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Hal tersebut di karenakan anggaran untuk desa wisata kecil dan tidak dapat menutup kebutuhan seperti perawatan perlengkapan dan pembuatan sarana dan prasarana. Sedangkan, dari sudut pandang masyarakat, menyebutkan bahwa mereka belum merasakan dampak dari adanya desa wisata. Karena, tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan implementasi dari program desa wisata. Dari sudut pandang tersebut, penulis melihat bahwa pengelolaan desa wisata sendangdalem belum melibatkan setiap unsur untuk mengembangkan desa tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hemas Prabawati dan Asnawi Manaf dengan judul Faktor-Faktor Keberhasilan Pengembangan Desa Wisata Di Dataran Tinggi Dieng disebutkan bahwa keberhasilan dari pengembangan desa wisata dapat dilihat dari keunikan lokasi, keterlibatan masyarakat, tokoh masyarakat dan kemampuan dalam menjadi mitra dengan stakeholder. Dijelaskan juga, faktor pendidikan juga cukup mempengaruhi keberhasilan serta keterbukaan masyarakat terhadap teknologi dan informasi. Dalam penelitian Made Heny Urmila Dewi, dkk tentang Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan Bali, disebutkan bahwa dominasi dari pemerintah begitu ketara dalam proses pengembangan desa wisata, sehingga masyarakat masih menjadi objek pembangunan bukan menjadi subjek pembangunan.

Pengelolaan Desa Wisata Sendangdalem secara struktural dikelola oleh pemerintah desa dan pokdarwis. Sehingga peran masyarakat masih sangat minim dalam keterlibatan dalam proses pengembangan desa wisata. Menurut Sunaryo (2017) menyebutkan bahwa masyarakat merupakan unsur vital dalam proses pengembangan desa wisata, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian Made, dkk (2013) juga menyebutkan bahwa masyarakat

harusnya menjadi objek pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan. Dapat dilihat bahwa konstelasi aktor-aktor di desa wisata sendangdalem, belum berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga masih terdapat peran yang dominan dari pemerintah desa dan pokdarwis. Lebih lanjut, terjadi perbedaan pandangan oleh pokdarwis dan masyarakat terhadap pengelolaan desa wisata juga menyebabkan peran dari aktor-aktor atau *stakeholder* belum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis berfokus untuk mengidentifikasi konstelasi aktor dan tata kelola Desa Wisata Sendangdalem. Distribusi peran *stakeholder* terkait untuk memetakan tugas serta peran, sehingga mampu mengetahui pembagian peran sejalan dengan *legitimacy* dan *power* yang dimiliki. Pengelolaan desa wisata tidak lepas dari peran *stakeholder* di dalam *hierarki* yang telah disepakati tersebut. Pemahaman mengenai peran yang ideal dalam proses tata kelola desa wisata menjadi hal yang harus diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan atau *over power* dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini berusaha untuk mengisi *missing link* dan menyempurnakan penelitian terdahulu. Maka dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan desa wisata di Desa Sendangdalem?
- b. Bagaimana hubungan aktor-aktor dalam pengelolaan desa wisata di Sendangdalem?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengidentifikasi pengelolaan Desa Wisata Sendangdalem. Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah
- b. Untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata di Sendangdalem
- c. Untuk menganalisis hasil penelitian terkait pengelolaan desa wisata berbasis komunitas di Desa Sendangdalem.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan desa wisata dan tingkat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan desa wisata sendangdalem. Dan sebagai referensi ketika dikemudian ahri terdapat penelitian serupa mengenai pengelolaan dan pengembangan desa wisata.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata serta diharapkan mampi menjadi masukan dan memberikan sumbangan bahan pertimbangan kebijakan dalam upaya mengelola desa wisata dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk peduli dalam pengembangan desa wisata.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Desa Wisata

Diskursus mengenai desa wisata, dewasa ini semakin serius. Selain potensi daerah yang beragam, ditambah dukungan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Istilah desa wisata merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman dipedesaan, kearifan lokal yang dimiliki, tradisi serta unsur-unsur unik yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Desa Wisata adalah bentuk interaksi yang berupa atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam tatanan kehidupan masyarakat desa yang menyatu menjadi kebiasaan dan tradisi setempat. (Joshi, 2012).

Desa wisata kini menjadi salah satu objek pariwisata yang menjadi prioritas pembangunan di Indonesia. Hal tersebut, karena dengan meningkatnya jumlah desa wisata yang dikelola dengan baik, maka berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Munculnya desa wisata juga memberikan warna baru di bidang pariwisata, dan tentunya keluar dari kebanyakan pariwisata yang menawarkan objek wisata pada umumnya. Desa wisata disini berperan sebagai wadah untuk menyerap tenaga kerja dipedesaan dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi

wilayah sekaligus upaya untuk pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

Menurut Subagyo (2015), pariwisata pedesaan atau yang sering disebut sebagai desa wisata merupakan objek wisata dengan objek dan daya tarik berupa kehidupan masyarakat desa dengan memiliki ciri khusus dalam interaksi di masyarakat, panorama alam dan budaya, sehingga mempunyai peluang untuk dijadikan pusat komoditi terkhusus wisatawan asing. Pengelolaan desa wisata tentu akan berpengaruh pada keberhasilan, yang tentunya berkaitan dengan intensitas kegiatan, lokasi, manajemen dan keterbilatan masyarakat lokal. Dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor kunci, karena sebagai subjek pembangunan. Inisiatif dalam mengelola usaha, profesionalitas, serta citra dari desa wisata menjadi salah aset untuk menjadikannya menarik wisatawan.

a. Tipe Desa Wisata

Dilihat dari pola, proses dan pengelolaan desa wisata di Indonesia terbagi menjadi:

1. Tipe terstruktur/daerah kantong, ditandai dengan:
 - Lahan wisata yang dilengkapi dengan infrastruktur dengan kawasan tersebut, serta mampu bersaing dalam pasar internasional
 - Lokasi desa wisata terpisah dengan masyarakat atau pemukiman penduduk, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif seperti pencemaran sosial budaya yang timbul akibat adanya interaksi antara masyarakat dan wisatawan.
 - Lahan yang dimiliki tidak terlalu besar dan masih dalam taraf pengembangan yang terintegrasi sehingga segala perubahan dalam desa tersebut dapat terpantau dengan baik.
2. Tipe terbuka, tipe desa wisata yang ini ditandai dengan adanya karakter penyatuan karakter masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat dari adanya persamaan dalam ruang dan pola masyarakat lokal dan wisatawan. Akan tetapi dampak negatif dari interaksi antara

masyarakat lokal dan wisatawan sulit untuk di tangani, karena sudah menyatunya antara adat dan kebiasaan dari para pendatang.

Pada dasarnya, dapat dilakukan tolak ukur terhadap pembangunan atau pengembangan pariwisata yang berbasis kepada masyarakat sebagai dsar terbentuknya desa wisata, yaitu dengan terciptanya hubungan harmonis antara masyarakat lokal, adat istiadat atau budaya dan wisatawan. Hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Meningkatkan antusiasmen pembangunan masyarakat melalui pemebntukan wadah organisasi untuk menampung aspirasi masyarakat untuk menciptakan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah setempat.
2. Adanya keberlanjutan dalam pengembangan lingkungan fisik yang terdapat di masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan melalui konservasi denagn tujuan untuk menciptakan lingkungan yang harmonis anantara sumber daya alam, budaya, manusia. Lebih lanjut, dapat ditemukan sebuah potensi yang masih tersimpan dalam desa tersebut, sehingga mampu menggali potensi lokal agar leboh meningkat secara dampak yang dirasakan oleh masyarakat.
3. Terciptahya keberlanjutan ekonomi melalui proses pemerataan dan kedalian dalam mengelola hasil dari pembangunan yang telah direncakaan oleh pemerintah dan masyarakat desa terkait.
4. Membangun suatau sistem yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjaga kepuasan wisatan melalui pelayanan yang optimal.

Dalam mengelola desa wisata, terdapat bentuk-bentuk yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat sebagai berikut:

1. Swadaya
2. Kemitraaan
3. Pendampingan

b. Pengembangan dan Pengelolaan Desa Wisata

1. Komponen Produk Desa Wisata

Menurut Cooper, desa wisata yang layak harus memiliki beberapa aspek yang harus dipenuhi. Aspek-aspek tersebut diantaranya yaitu *Attraction, Accessibility, Amenity, Ancillary*.

- a. *Attraction*, merupakan daya tarik atau produk utama yang harus dimiliki oleh destinasi wisata, hal tersebut berkaitan dengan apa yang akan diperoleh oleh wisatawan ketika berkunjung. Daya tarik ini dapat meliputi keindahan alam, budaya masyarakat/kearifan lokal, saran dan lain sebagainya yang mampu menunjuang wisatawan tertarik untuk berkunjung ke lokasi tersebut.
- b. *Accessibility* atau keterjangkauan merupakan hal penting dalam meningkatkan daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu tempat wisata. Sarana dan infrastruktur menuju lokasi desa wisata berupa akses jalan dan ketersediaan transportasi atau rambu-rambu penunjukkan jalan, menjadi hal yang harus tersedia dalam komponen pengembangan desa wisata.
- c. *Amenity* (fasilitas pendukung) adalah segala fasilitas pendukung yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari wisatawan selama berada di lokasi destinasi wisata. Amenitas ini berkaitan dengan sarana yang mampu memberikan kenyamanan kepada para pengunjung atau wisatawan seperti penginapan dan resotran atau tempat makan di lokasi wisata.
- d. *Anciliary* (Kelembagaan pendukung) hal ini berkaitan dengan ketersediaan organisasi yang mendukung desa wisata. Sebagai contoh seperti pokdarwis, karang taruna atau organisasi lain yang berada di desa tersebut.

Kriteria Desa Wisata

Dalam perkembangannya desa wisata sangat bermunculan di Indonesia, tidak terkecuali di Jawa Tengah terkhusus Kabupaten Kebumen. Dalam mewujudkan desa wisata, suatu desa harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Atraksi wisara

- b. Jarak tempuh
 - c. Besaran Desa
 - d. Sistem kepercayaan masyarakat
 - e. Ketersediaan infrastruktur
2. Pendekatan Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata memiliki potensi yang sangat besar untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, beberapa upaya untuk mengembangkan desa wisata dalam dilakkan melalui beberapa pendekatan diantaranya:

- a. Pendekatan Pasar, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara interaksi secara langsung dan tidak langsung antara masyarakat dan wisatawan
- b. Pendekatan Fisik, merupakan solusi untuk mengembangkan desa wisata dengan memanfaatkan keunikan atau kearifan lokal yang dimiliki oleh daerah tersebut, seperti tarian, rumah adat tradisi dan lain sebagainya.

1.5.2 Stakeholder Analyst

Studi Freeman (1984) yang berjudul “Manajemen Strategis: Pendekatan Stakeholder” (kemudian dikenal sebagai Teori Stakeholder) adalah serangkaian kebijakan dan praktik yang saling berhubungan, bernilai, dan memenuhi persyaratan hukum yang menyatakan bahwa menghormati masyarakat dan lingkungan dan memiliki komitmen untuk memberikan kontribusi yang berkelanjutan. Analisis pemangku kepentingan mengatakan bahwa perusahaan harus menguntungkan pihak lain, bukan hanya entitas yang bertindak semata-mata untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah atau stakeholders dalam pemerintahan sangat dipengaruhi oleh dukungan stakeholders tersebut (Ghozali & Chariri, 2007).

Stakeholder adalah sistem yang secara eksplisit didasarkan pada pandangan tentang organisasi dan lingkungannya, dan berhubungan dengan sifat kompleks dan dinamis dari interaksi antara keduanya. Pemangku kepentingan dari suatu entitas, komunitas, atau organisasi saling

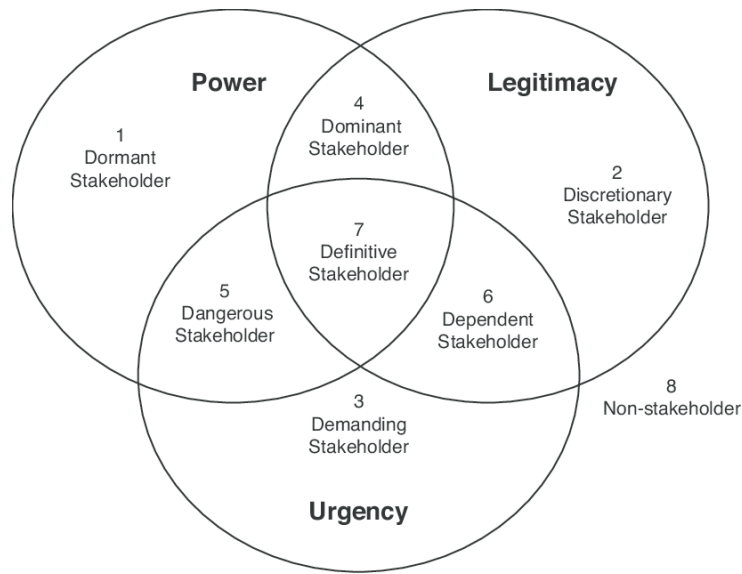
mempengaruhi. Hal ini terlihat pada interaksi atau dukungan dari pihak-pihak tersebut yang terbentuk dari tanggung jawab dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pentingnya akuntabilitas kepada stakeholders. Dengan teori ini, semakin kuat hubungan antar pemangku kepentingan, semakin kuat pula manajemennya. Peran hubungan pemangku kepentingan dalam suatu komunitas, organisasi, atau perusahaan penting untuk meningkatkan kualitasnya, karena interaksi yang saling menguntungkan memiliki dampak yang signifikan, dan sebaliknya. Hubungan sinergis antar pemangku kepentingan berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan kolaborasi.

Analisis pemangku kepentingan adalah konsep manajemen strategis yang bertujuan membantu perusahaan memperkuat hubungan mereka dengan kelompok eksternal dan membangun keunggulan kompetitif mereka. Gray, Kohi, dan Adams telah menyatakan bahwa kelangsungan hidup perusahaan bergantung pada dukungan para pemangku kepentingannya, dan aktivitas perusahaan adalah mencari dukungan tersebut. Semakin kuat pemangku kepentingan, semakin besar keberhasilan perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu perusahaan antara lain investor, karyawan, pemasok, masyarakat dan pemerintah (Robbins dan Coulter, 2007).

Hal ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk memainkan peran penting dalam meningkatkan keberhasilan suatu organisasi, perusahaan, atau bisnis. Munculnya paradigma governance berarti pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya entitas dalam pengambilan kebijakan. Usman (2016) menyatakan bahwa terminologi governance mengakui adanya pengambilan keputusan di berbagai tingkatan sehingga pemangku kepentingan dapat berperan dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Melalui partisipasi dan interaksi berbagai partai politik, yang sekarang disebut kelompok pemangku kepentingan, partai-partai ini berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan politik untuk rasionalitas yang lebih baik.

Freeman (2015) menyajikan pendekatan analisis pemangku kepentingan yang membantu menganalisis atau mengidentifikasi hubungan

antara pihak-pihak yang saling mempengaruhi atau tidak mempengaruhi dalam suatu kebijakan. Mengikuti Freeman 2015), Mitchell, Angle dan Wood (1997) mengategorikan pemangku kepentingan berdasarkan tiga atribut utama: kekuasaan (power), otoritas (legitimasi), dan kepentingan (urgency). Tiga atribut utama pemangku kepentingan dibagi menjadi delapan kombinasi.



Gambar 1. 1 Kombinasi Atribut Teori Mitchel

- a. *Dormant Stakeholders*, pemangku kepentingan yang memiliki *power*. Tetapi karena tidak memiliki *legitimacy* dan *urgency*, maka peran yang dimilikinya menjadi pasif;
- b. *Discretionary stakeholder*, pemangku kebijakan yang memiliki atribut *legitimacy* namun tidak memiliki kekuatan dan kepentingan yang mendesak, sehingga perannya hanya sebagai penerima tanggungjawab;
- c. *Demanding stakeholders*, pemangku kepentingan yang menuntut atau mendesak sebuah kebijakan karena adanya atribut *urgency* yang besar;
- d. *Dominant stakeholders*, merupakan pemangku kepentingan yang memiliki *power* dan *legitimacy*, sehingga perannya sangat vital dalam proses sebuah kebijakan;

- e. *Dongerous stakeholders*, pemangku kepentingan yang mempunyai kekuatan dan kepentingan, sehingga perannya dapat berpotensi koersif dan berbahaya karena bersifat memaksa;
- f. *Dependent stakeholders*, pemangku kepentingan yang bergantung pada pihak lain yang lebih memiliki *power* atas kebijakan;
- g. *Defenitive stakeholder*, yaitu pemangku kepentingan yang memiliki tiga atribut utama;
- h. *Nostakeholder*, yaitu pihak yang tidak mempunyai ketiga atribut utama dalam sebuah kebijakan.

Stakeholder analys merupakan alat yang digunakan untuk memeberikan pemahaman bagaimana individu atau kelompok mempengaruhi kebijakan dan institusi, serta bagaimana kebijakan dan institusi mampu mempengaruhi orang lain. Hal tersebut, sangat berguna digunakan dalam mengidentifikasi mengenai kemampuan tantangan yang harus dihadapi untuk mengubah, mengatasi perbedaan (IIED,2005). Berdiskursus perihal pemangku kepentingan, tentu saja akan mengarah pada kepentingan-kepentingan stakeholders yang sejalan dan tidak sejalan atau berlawanan dengan agenda utamanya. Hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah sunberdaya-sumberdaya yang dialokasikan oleh tiap-tiap pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang merasa dirinya memiliki kontribusi yang lebih besar dari pemangku kepentingan yang lain, memiliki probabilitas untuk memonopoli proyek bersama tersebut ke arah yang sesuai dengan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Selain itu, pada prosesnya *stakeholder analys* digunakan untuk memetan dan mengindetifikasi proses penyusunan kebijakan seperti proses digalog dan negosiasi. Pada prakteknya, terdapat lima langkah yang ditempuh dalam proses menganalisis *stakeholder*:

a. *Stating the Issue*

Langkah dasar yang dilakukan yaitu fokus ada permasalahan yang akan dibahas, karena menjadi aspek penting menganalisis

lebih dalam. Selain itu, aspek kontekstual juga terkadang bergangung kepada siapa yang memegang peranan atau pemangku kepentingan terkait.

b. *Identifying Stakeholders*

Pemangku kepentingan adalah aktor—individu, kelompok, atau lembaga yang berkepentingan dengan hal tersebut. Bergantung kepada sejauh mana mereka terpengaruh, mereka dapat diklasifikasikan sebagai primer, sekunder, atau tersier (biasanya pemangku kepentingan institusional). Mereka bisa menjadi, korban, pemodal, atau penghasut. Pemangku kepentingan dapat juga di tingkat lokal, kabupaten, nasional, atau internasional. mengidentifikasi pemangku kepentingan dengan bertanya-tanya melihat ke dalam pemangku kepentingan dalam masalah tanah tertentu

c. *Analyzing roles, interests, power dan capacity*

Melakukan rekomendasi menggunakan alat analisis dengan 4R yaitu hak, penghargaan manfaat, tanggungjawab, dan hubungan untuk mengungkapkan segala pertimbangan yang ada, serta menggali siapa *stakeholder* yang berpengaruh dan melihat peran yang diharapkan dalam tata kelola tersebut untuk menghasil kebijakan.

d. *Map out stakeholder*

Memetakan pemangku kepentingan dalam matriks sesuai dengan tingkat minat (rendah atau tinggi) dan tingkat kekuasaan atau pengaruh (lemah/rendah atau kuat) pada masalah tersebut. Langkah untuk memetakan kepentingan dari pemangku kepentingan dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan berikut:

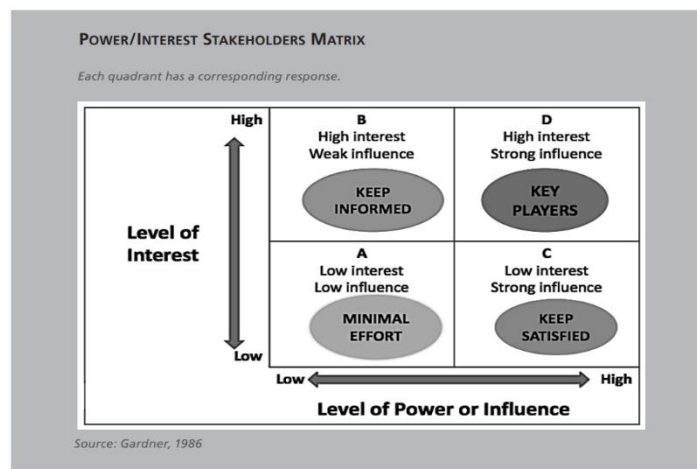
- Apa adalah sifat dari kepentingan mereka?
- Apa kepentingan mereka dalam usulan? Mengubah atau menguatkan

- Apakah mereka memiliki potensi minat yang tinggi dari yang diusulkan? kebijakan atau perubahan?
- Bagaimana dengan tingkat pengaruh mereka? Apakah mereka dianggap sebagai kelompok yang kuat? Perhatikan bahwa beberapa grup mungkin memiliki sangat minat yang tinggi, tetapi tidak ada kuasa atas suatu masalah.

Pemangku kepentingan dapat ditempatkan ke dalam salah satu dari empat kuadran. Empat kuadran adalah: minat tinggi-pengaruh lemah; minat rendah-pengaruh rendah; minat tinggi-pengaruh kuat; dan minat rendah—pengaruh kuat.

e. *Assign actions for each square in the quadrant*

Gardner (1986) menentukan tindakan tertentu yang sesuai untuk setiap kuadran, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. 2 Power/Interest Stakeholder Matrix

Pada dasarnya, *stakeholder* yang berada di Kuadran D adalah pemain kunci yang memiliki baik pengaruh yang kuat maupun minat yang tinggi karena itu Anda harus fokus usaha dan perhatian. Jika pengaruhnya tinggi, tetapi minatnya tetap rendah (Kuadran C), maka tindakannya untuk mengambil adalah untuk menjaga para pemangku kepentingan ini puas.

Jika minatnya adalah tinggi, tetapi pengaruhnya lemah (Kuadran B), itu akan berguna untuk Anda pertahankan mereka diinformasikan (terutama jika Anda memiliki kampanye) Terakhir, untuk pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang rendah serta pengaruh yang rendah, disarankan bagi Anda untuk menjaga upaya seminimal mungkin.

Konsep stakeholder analysis memiliki beberapa bermanfaat untuk memetakan dan mengidentifikasi peran dan kontribusi aktor dalam proses kebijakan yang akan dijalankan dalam suatu pemerintahan atau komunitas terkait:

- a. Untuk mengidentifikasi minat, kepentingan dan pengaruh para stakeholder terhadap kegiatan program atau proyek yang sedang berjalan;
- b. Untuk mengidentifikasi dan memetakan kelembagaan-kelembagaan lokal berikut proses-proses untuk mengembangkan kapasitasnya;
- c. Untuk membangun pondasi dan strategi partisipasi masyarakat. Program kerja yang berjalan tidak lepas dari melibatkan peran stakeholder di dalamnya, berikut ini terdapat beberapa rencana melibatkan pemangku kepentingan dalam proses analisis peran stakeholder:

Program kerja yang berjalan tidak lepas dari melibatkan peran *stakeholder* di dalamnya, berikut ini terdapat beberapa rencana melibatkan pemangku kepentingan dalam proses analisis peran *stakeholder*:

- a. Ketertarikan, pengaruh, dan kepentingan dari kelompok stakeholder;
- b. Upaya-upaya khusus yang diperlukan untuk melibatkan stakeholder-stakeholder yang penting atau berkepentingan namun tidak mempunyai pengaruh;
- c. Bentuk-bentuk partisipasi yang memadai pada keseluruhan siklus program/proyek.

Adapun ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memetakan peran dari stakeholder terkait:

1. Stakeholder yang mempunyai daya pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi; maka dilibatkan secara penuh di keseluruhan tahapan program untuk memberikan keyakinan bahwa keberhasilan program kerja merupakan hasil dari dukungan pihak terkait.
2. Stakeholder yang mempunyai daya pengaruh tinggi namun tidak terlalu berkepentingan; tidak menjadi target utama dari program, tetapi sangat menjadi penentang atau memberikan intervensi. Sehingga perlu mendapatkan perlakuan bahwa keberadaannya penting, selalu berikan informasi-informasi, dan memberikan pengakuan terhadap pandangan-pandangan, karena hal ini perlu dilakukan agar tidak timbul konflik terbuka di dalam program.
3. Pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh kecil tetapi sangat tertarik dengan program. Upaya khusus dan strategi khusus juga diperlukan agar para pihak yakin bahwa kebutuhan mereka selaras dengan tujuan program dan keterlibatan mereka dalam program benar-benar diperlukan.
4. Pemangku kepentingan dengan sedikit pengaruh dan kepentingan. Pihak-pihak ini akan terus terlibat dalam program, tetapi tidak memerlukan strategi atau komitmen khusus.

1.5.3 Community Base Tourism (CBT)

Salah satu tujuan pengembangan kawasan destinasi wisata adalah pemberdayaan masyarakat (komunitas setempat). Adimihardja (1999) dalam Sunaryo (2013:215) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai suatu proses yang tidak saja hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat yang sedang tidak berdaya, namun demikian juga harus berupaya dapat meningkatkan harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya serta terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Menurutnya, pemberdayaan masyarakat dipercaya sebagai upaya untuk menguatkan (*empowering*) daripada masyarakat yang sebelumnya tidak atau kurang berdaya (*powerless*).

Peran masyarakat dalam pengembangan kawasan destinasi wisata sangat strategis. Melalui sumber daya yang dimiliki, baik berupa adat, tradisi dan budaya serta kapasitasnya, berperan sebagai tuan rumah (host), namun

juga sekaligus memiliki kesempatan sebagai pelaku pengembangan kepariwisataan sesuai kemampuan yang dimilikinya (Sunaryo, 2013: 217). Namun dalam praktisnya, kadang kala peran dari masyarakat ini masih sangat kecil dan lebih didominasi oleh peran pemerintah dan sector swasta. Salah dua penyebabnya adalah rendahnya partisipasi dalam pengelolaan maupun pengambilan keputusan dan lemahnya akses terhadap sumber daya pariwisata yang dimiliki.

Sunaryo (2013: 138) lebih lanjut menyatakan bahwa pengembangan pariwisata untuk pemberdayaan masyarakat merupakan masalah strategi pengembangan pariwisata saat ini. Dalam ilmu pariwisata, strategi ini dikenal dengan Community Based Tourism (CBT). Membangun pariwisata berbasis masyarakat pada dasarnya adalah salah satu gagasan penting dan penting dalam pengembangan teori pengembangan pariwisata tradisional (model berorientasi pertumbuhan), mengabaikan hak dan mengasingkan masyarakat lokal dari kegiatan pariwisata. Tujuan perjalanan liburan. Secara konseptual, prinsip dasar CBT adalah memosisikan masyarakat sebagai pemain kunci melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pariwisata sehingga manfaat terbesar pariwisata ditentukan oleh masyarakat. Tujuan utama dari pengembangan pariwisata adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (lokal).

Murphy Sunaryo (2013: 139) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata pada hakekatnya tidak terlepas dari sumber daya dan keunikan masyarakat setempat, baik berupa unsur fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya). Kegiatan berbasis komunitas. Untuk itu, ada batasan-batasan berikut dalam memahami CBT:

- a) Suatu bentuk tata kelola pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengelola dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata yang ada.
- b) Bentuk tata kelola pariwisata yang memberikan peluang bagi mereka yang terlibat langsung dalam pariwisata juga dapat menguntungkan pariwisata yang ada.

- c) Suatu bentuk pariwisata yang membutuhkan pemberdayaan yang sistematis dan demokratis serta pembagian manfaat yang adil kepada komunitas destinasi yang kurang mampu.

Sedangkan menurut Garrod (2001:4), CBT diartikan sebagai suatu bentuk pariwisata yang mengelola dan mengembangkan pariwisata serta memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi. CBT juga bermanfaat bagi mereka yang tidak terlibat langsung dalam pariwisata, mencari pemberdayaan politik dan demokratisasi, dan pemerataan manfaat bagi penduduk lokal dan masyarakat pedesaan yang kurang beruntung.

Ciri CBT Hudson (Timothy, 1999: 373) adalah upaya program bantuan untuk melindungi masyarakat dan kelompok kepentingan lain yang memiliki kontrol lebih besar atas manfaat yang dicapai dan proses sosial untuk mencapai kesejahteraan, terkait dengan keberadaan. Sementara itu, pandangan Murphy (1985: 153) tentang karakteristik khusus CBT menggarisbawahi tujuan komunitas tuan rumah dan strategi yang berfokus pada mengidentifikasi keinginan dan kemampuan mereka untuk menyerap manfaat pariwisata. .. Menurut Murphy, setiap komunitas harus didorong untuk mengidentifikasi tujuan mereka sendiri dan mengoordinasikan pariwisata untuk meningkatkan kebutuhan komunitas lokal. Untuk itu perlu adanya perencanaan yang mencakup aspek sosial dan lingkungan serta industri pariwisata yang mempertimbangkan wisatawan dan masyarakat lokal..

Sementara itu Yaman & Mohd (2004: 584 -587) menggarisbawahi beberapa kunci pengaturan pembangunan pariwisata dengan pendekatan CBT yaitu:

- 1) Pertama, adanya dukungan pemerintah: CBT membutuhkan dukungan struktur yang multi institusional agar sukses dan berkelanjutan. Pendekatan CBT berorientasi pada manusia yang mendukung pembagian keuntungan dan manfaat yang adil serta mendukung pengentasan kemiskinan dengan mendorong pemerintah dan masyarakat untuk tetap menjaga SDA dan budaya. Pemerintah akan berfungsi seba-

gai fasilitator, koordinator atau badan penasehat SDM dan penguatan kelembagaan.

- 2) Kedua, partisipasi dari *stakeholder*. CBT dideskripsikan sebagai variasi aktivitas yang meningkatkan dukungan yang lebih luas terhadap pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Konservasi sumber daya juga dimaksudkan sebagai upaya melindungi dalam hal memperbaiki mata pencaharian/penghidupan masyarakat. CBT secara umum bertujuan untuk penganekaragaman industri. Peningkatan partisipasi yang lebih luas ini termasuk partisipasi dalam sektor informal, hak dan hubungan langsung/tidak langsung dari sektor lainnya. Pariwisata berperan dalam pembangunan internal dan mendorong pembangunan aktivitas ekonomi yang lain seperti industri, jasa dan sebagainya. Anggota masyarakat dengan kemampuan kewirausahaan dapat menentukan/membuat kontak bisnis dengan *tour operator, travel agent* untuk memulai bisnis baru.
- 3) Ketiga, pembagian keuntungan yang adil. Tidak hanya berkaitan dengan keuntungan langsung yang diterima masyarakat yang memiliki usaha di sektor pariwisata tetapi juga keuntungan tidak langsung yang dapat dinikmati masyarakat yang tidak memiliki usaha. Keuntungan tidak langsung yang diterima masyarakat dari kegiatan ekowisata jauh lebih luas antara lain berupa proyek pembangunan yang bisa dibiayai dari hasil penerimaan pariwisata.
- 4) Keempat, penggunaan sumber daya lokal secara berkelanjutan. Salah satu kekuatan ekowisata adalah ketergantungan yang besar pada sumber daya alam dan budaya setempat. Dimana aset tersebut dimiliki dan dikelola oleh seluruh anggota masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, termasuk yang tidak memiliki sumber daya keuangan. Hal itu bisa menumbuhkan kepedulian, penghargaan diri sendiri dan kebanggaan pada seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian sumber daya yang ada menjadi lebih meningkat nilai, harga dan menjadi alasan mengapa pengunjung ingin datang ke desa.

- 5) Kelima, penguatan institusi lokal. Pada awalnya peluang usaha pariwisata di daerah pedesaan sulit diatur oleh lembaga yang ada. Penting untuk melibatkan komite dengan anggota berasal dari masyarakat. Tujuan utamanya adalah mengatur hubungan antara penduduk, sumber daya dan pengunjung. Hal ini jelas membutuhkan perkembangan kelembagaan yang ada di sana. Yang paling baik adalah terbentuk lembaga dengan pimpinan yang dapat diterima semua anggota masyarakat. Penguatan kelembagaan bisa dilakukan melalui pelatihan dan pengembangan individu dengan keterampilan kerja yang diperlukan (teknik, managerial, komunikasi, pengalaman kewirausahaan, dan pengalaman organisasi). Penguatan kelembagaan dapat berbentuk forum, perwakilan, dan manajemen komite.
- 6) Keenam, keterkaitan antara level regional dan nasional. Komunitas lokal seringkali kurang mendapat link langsung dengan pasar nasional atau internasional, hal ini menjadi penyebab utama mengapa manfaat ekowisata tidak sampai dinikmati di level masyarakat. Perantara yaitu yang menghubungkan antara aktivitas ekowisata dengan masyarakat dan turis justru membuat keuntungan lebih banyak

Menurut Garrod (2001:4), ada dua pendekatan untuk menerapkan prinsip-prinsip perencanaan dalam konteks pariwisata. Pendekatan pertama berkaitan dengan sistem perencanaan yang lebih formal dan menekankan potensi manfaat ekowisata. Pendekatan kedua berfokus pada konsep perencanaan partisipatif, yang melibatkan ketentuan dan pengaturan yang menunjukkan pembangunan yang lebih seimbang dan perencanaan yang terkelola. Pendekatan ini lebih menekankan pada kepekaan terhadap lingkungan alam dalam dampak pengembangan ekowisata.

Prinsip Penerapan CBT

Menurut Nicole Hausler terdapat tiga gagasan utama dalam konsep *community based tourism*:

- a. Bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata

- b. Masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapatkan keuntungan
- c. Menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratis dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung.

Terdapat beberapa prinsip dasar CBT yang disampaikan

Suansri(2003:12) dalam gagasannya yaitu:

- 1) Mengakui, mendukung dan mengembang -kan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata
- 2) Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek
- 3) Mengembangkan kebanggaan komunitas
- 4) Mengembangkan kualitas hidup komunitas
- 5) Menjamin keberlanjutan lingkungan
- 6) Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area local
- 7) Membantu berkembangnya pembel ajaran tentang per-tukaran budaya pada komunitas
- 8) Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia
- 9) Mendistribusikankeuntungan secara adil pada anggota komunitas
- 10) Berperan dalam menentukan prosentasependapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek yang ada di komunitas.

Suansri (2003: 21-22) juga mengembangkan lima dimensi. Ini adalah aspek kunci dari pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT), termasuk:

- 1) Aspek ekonomi dengan indikator untuk menghasilkan dana untuk pengembangan masyarakat, menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata, dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal.
- 2) Aspek sosial dengan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kebanggaan masyarakat, pembagian peran yang setara antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan dari segala usia, dan indikator mekanisme penguatan organisasi masyarakat.
- 3) Aspek budaya dengan indikator mendorong masyarakat untuk menghargai budaya yang berbeda dan mendorong berkembangnya pertukaran budaya serta adanya budaya berkembang yang melekat erat pada budaya lokal.

- 4) Ada aspek lingkungan yang menunjukkan ketahanan pengembangan lahan, dan ada sistem pengolahan limbah yang ramah lingkungan, dan ada kekhawatiran tentang pentingnya pelestarian alam.
- 5) Adanya aspek politik, indikator upaya peningkatan partisipasi masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat luas, dan mekanisme jaminan hak masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Menurut Suanshi, kelima prinsip tersebut merupakan manifestasi dari praktik pariwisata berkelanjutan. Dia menambahkan, guna mengaktualisasikan prinsip-prinsip di atas dalam tata kelola pengembangan pariwisata, maka setidaknya terdapat 11 hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu, yaitu:

- 1) Mengenali, mendukung, dan mempromosikan kepemilikan masyarakat dalam pariwisata;
- 2) Melibatkan anggota masyarakat dari setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspeknya,
- 3) Mempromosikan kebanggaan terhadap komunitas bersangkutan;
- 4) Meningkatkan kualitas kehidupan;
- 5) Menjamin keberlanjutan lingkungan;
- 6) Melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat lokal;
- 7) Mengembangkan pembelajaran lintas budaya;
- 8) Menghormati perbedaan budaya dan martabat manusia;
- 9) Mendistribusikan keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara proporsional kepada anggota masyarakat;
- 10) Memberikan kontribusi dengan persentase tertentu dari pendapatan yang diperoleh untuk pengembangan masyarakat;
- 11) Menonjolkan keaslian hubungan masyarakat dengan lingkungannya

Dari prinsip yang ditawarkan oleh Suansri di atas, dapat disimpulkan jika CBT dikembangkan berdasar prinsip keseimbangan dan keselarasan antar kepentingan stakeholder pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Secara ideal prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menekan pada pembangunan pariwisata “dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat”. Setiap tahapan pembangunan, yang dimulai

dari perencanaan, pembangunan dan pengembangan sampai dengan pengawasan (monitoring) dan evaluasi, masyarakat setempat harus dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi karena tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

3. Partisipasi dan Kemandirian Desa

Menurut Sunaryo (2013: 140), partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari dua perspektif: partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi terkait dengan pembagian manfaat yang diterima masyarakat dari pengembangan pariwisata. Oleh karena itu, pada dasarnya ada tiga prinsip utama dalam strategi perencanaan pembangunan pariwisata berbasis CBT. Mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan.

- a. Adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan.
- b. Pendidikan Kepariwisata bagi masyarakat lokal

Sedangkan Adiyoso (2009) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan komponen terpenting dalam upaya pertumbuhan kemandirian dan proses pemberdayaan. Partisipasi tersebut dapat dilakukan sejak proses perencanaan, pelaksanaan, implementasi atau pengelolaan, pemanfaatan, *monitoring* dan *controlling* serta evaluasi. Pengabaian terhadap partisipasi lokal dalam upaya pengemangan desa wisata adalah satu kesalahan besar yang menjadi awal mula kegagalan dalam pengembangan desa wisata.

CBT berkaitan erat dengan adanya partisipasi dari masyarakat lokal. Menurut Timothy(1999:372) partisipasi masyarakat dalam pariwisata terdiri dari dua perspektif yaitu partisipasi lokal dalam proses pengambilan keputusan dan partisipasi lokal berkaitan dengan keuntungan yang diterima masyarakat dari pembangunan pariwisata.

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata, Timothy (1998:377-382) menggunakan beberapa variabel sebagai berikut:

- 1) Proses konsultasi publik dan definisi tujuan setempat (lokal), dalam hal ini menanyakan kepada pedagang kecil, pemilik penginapan, pemilik restoran/warung dan persewaan mobil yang ada di sekitar kawasan wisata

apakah mereka diajak berkonsultasi oleh pemerintah tentang perencanaan pariwisata, apakah mereka merasa pemerintah harus berkonsultasi dengan masyarakat local untuk merencanakan pariwisata dan apakah mereka ingin lebih dilibatkan dalam perencanaan pariwisata.

- 2) Input/masukan/pendapat dari stakeholder (masyarakat, pemerintah termasuk organisasi kepariwisataan) dan NGO, yaitu berkaitan dengan perlu tidaknya mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan pariwisata dan proses perencanaan kepariwisataan.
- 3) Mengikutsertakan masyarakat local dalam memanfaatkan industri pariwisata.
- 4) Pendidikan bagi penduduk lokal.

Di sisi yang lain, Garrod (2001) berupaya untuk menyampaikan pemikirannya terkait elemen-elemen dari perencanaan pariwisata partisipatif yang sukses, yaitu:

- 1) Membutuhkan kepemimpinan yang efektif (memiliki kredibilitas sebagai orang yang memahami, empati dan peduli dengan pendapat stakeholder, memiliki kredibilitas sebagai seseorang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di daerah tersebut, mandiri, memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah yang nyata dan tidak nyata, memiliki kemampuan mengatur partisipan, bersedia mengembangkan kelompok), mampu mengarahkan keterlibatan yang sifatnya top down ke bottom up)
- 2) Pemberdayaan masyarakat local
- 3) Mengkaitkan keuntungan ekonomi dengan konservasi
- 4) Melibatkan stakeholder local dalam setiap tahapan proyek
- 5) Adanya partisipasi lokal dalam monitoring dan evaluasi proyek.

Memberdayakan masyarakat sama dengan memberdayakan dan memberdayakan masyarakat. Inti dari pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan keterampilan seluruh desa yang ada untuk mencapai tujuannya. Tujuan dicapai dengan meningkatkan motivasi, inisiatif pribadi dan kreativitas untuk memajukan perekonomian dan membawa kemakmuran bagi desa. Dan upaya pemberdayaan masyarakat desa ini diwujudkan melalui BUMD yang berhasil dibentuk di dalamnya. Dengan pengembangan desa wisata, kami

bertujuan untuk membuat desa mandiri dan meningkatkan situasi ekonomi penduduk setempat.

Beberapa indikator kemandirian desa menurut Agusta dan Fujiartanto (2014: 66-67) adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Dasar;
2. Kegiatan Kemasyarakatan;
3. Fasilitas Publik;
4. Kegiatan Ekonomi.

4. Eksistensi BUMDes

Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, BUMDes adalah suatu badan yang di dalamnya seluruh atau sebagian besar desa dimiliki dengan turut serta secara langsung atas kekayaan desa, dan kekayaan serta jasa yang dimungkinkan untuk kesejahteraan penduduk desa, dan usaha-usaha lainnya dipisahkan. untuk mengelola. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten/kota akan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMD. Karena ketentuan ini bersifat wajib dan bukan sukarela, maka pengelolaan BUMD memperhatikan kekhasan masing-masing daerah (Permendagri No. 38/2010 tentang BUMD)..

Ahsani, Retno D.P., dkk. (2018: 138) meyakini bahwa salah satu alat terpenting untuk mewujudkan desa mandiri adalah pembentukan BUMD. BUMD dapat dijadikan wadah bagi masyarakat lokal untuk memberdayakan desa dan mandiri dari destinasi desa wisata yang ditawarkan. Hal ini karena desa tidak seluas pemerintah daerah, tetapi dianggap sebagai entitas kekuasaan, komunitas hukum atau hukum publik. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan "mengatur" dan "mengelola", dan apa yang dimaksud dengan "masalah pemerintah" dan "kepentingan masyarakat"?

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan serangkaian usaha atau kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan dengan sistematis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Penelitian

didefinisikan sebagai aktivitas yang terorganisir, dengan menggunakan data, sistematis yang dilaksanakan secara objektif, kritis dan ilmiah untuk memperoleh suatu pemahaman terhadap suatu permasalahan, menurut Sekarng (Raco, 2010:50). Proses penelitian harus memperhatikan prosedur yang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid atau benar. Kemudian, metode penelitian berkaitan dengan bagaimana cara penulis menyelesaikan permasalahan melalui proses merumuskan masalah, mencari data dan menyusun laporan penelitian. Adapun serangkaian penelitian mencakup aktivitas sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang memiliki arti mengungkapkan permasalahan yang diteliti secara mendalam dalam ruang lingkup yang kecil. Kualitatif memiliki sifat deskriptif dan menggunakan pendekatan induktif dalam memberikan makna atau perspektif kepada subjek yang menonjol Burhan Bungin (2003: 70). Dalam memecahkan masalah peneliti akan memamarkan dengan mendeskripsikan permasalahan dan fenomena yang ada di lapangan menggunakan kata-kata yang kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut.

Penelitian Kualitatif deskriptif dapat dikatakan dapat menyesuaikan dengan gagasan anatra peneliti dan informan, karena dalam menjawab fenomena sosial yang terjadi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang. Sehingga tidak hanya terpaku kepada data yang diperoleh bahkan sebatas angka saja. Data yang diperoleh dari penelitian berupa kalimat hasil wawancara bersama dengan informan, yang kemudian dianalisis dan ditarik benang merah dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Mengenai hal-hal yang dibahas oleh peneliti mengenai pengelolaan Desa Wisata Sendangdalem berbasis komunitas.

Metode Kualitatif (Sugiyono, 2015), digunakan untuk memahami makna dibalik data yang tampak, kemudian untuk memahami interaksi sosial dan dinamika sosial, dan bahkan melakukan pembahasan yang lebih

mendalam melalui pertanyaan yang diajukan. Metode kualitatif dapat dikatakan sebagai istilah umum untuk menyebutkan teknik penelitian seperti observasi, wawancara individu atau kelompok untuk memahami pengalaman dan praktik yang dialami oleh informan sebagai untuk untuk menempatkan mereka dalam kedudukan dan konteks yang sesuai dan tepat (Marsch dan Stoker, 2011). Maka dalam prakteknya penelitian kualitatif dapat diangkat sebagai ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan yang dilakukan oleh penulis dan berhubungan dengan orang yang terkait dengan topik yang dibahas (Kirk dan Miller dalam Lexy J. Moloeng, 2022).

Penelitian Kualitatif dalam proses pengamnilan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi suatu masalah atau persoalan (Ismail Nurdin, 2019). Penelitian penulis membahas mengenai pengelolaan desa wisata berbasis komunitas di Desa Sendangdalem menggunakan purposive sampling, dengan menentukan sample sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian, digali oleh peneliti mengenai pengelolaan desa wisata berbasis komunitas di Desa Sendangdalem. Adapun sample yang ditentukan yaitu Pemerintah Desa Sendangdalem, pokdarwis, masyarakat Desa Sendangdalem, dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Peneliti tidak menutup untuk melakukan snowball ketika informasi yang didapatkan masih kurang, dan belum sesuai dengan kebutuhan penelitian.

1.6.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan suatu lokasi penelitian berlangsung dan dilaksanakan proses pengambilan data yang diperoleh dari tempat tersebut. Adapun penelitian tersebut dilaksanakan di Desa Sendangdalem Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Fokus latar penelitian di Desa Sendangdalem. Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada hari kerja senin-jum'at menyesuaikan dengan kesediaan dari informan. Sedangkan untuk masyarakat desa atau tokoh masyarakat akan dilakukan secara opsional,

seperti saat diwarung atau dimasjid ketika ada kesempatan untuk melakukan wawancara atau pengambilan data.

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian berkaitan dengan individu atau kelompok yang akan diminta keterangan mengenai pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Subjek Penelitian akan memberikan informasi yang merupakan sumber data dalam penelitian yang diambil, dalam hal ini disebut informan. Adapun teknik yang digunakan yaitu wawancara melalui memberikan pertanyaan yang diajukan kepada informan. Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive dilaksanakan melalui pengambil subjek penelitian dalam mendalami objek situasi sosial yang akan dijiikan subjek penelitian (Sugiyono, 2013 : 19). Teknik ini memiliki kelebihan sebab dapat mengabungkan minat dan perbedaan jawaban dari masing-masing informasn, sehingga akan memperkaya data peneliti dan mengurangi bias informasi. Pada penelitian ini, informan yang terlibat secara langsung meliputi:

- a. Kepala Desa Sendangdalem
- b. Perangkat Desa Sendangdalem
- c. Pokdarwis
- d. Pengelola Desa Wisata Sendangdalem
- e. Masyarakat Desa Sendangdalem

1.6.4 Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif. Metode kualitatif menekankan pada pengamatan terhadap suatu fenomena. Penelitian Kualitatif berguna untuk memahami kejadian, fakta, gejala, peristiwa, masalah ataupun realita serta bukan untuk mempelajari atau melakukan pembuktian terhadap sebab-akibat dari fenoma atau kejadian tersebut (Raco, 2010: 106-107). Sumber data merupakan bagaimana subjek diperoleh dalam penelitian. Sumber data menjadi hal yang penting dalam melakukan penelitian. Sumber daya utama dalam penelitian kualitatif berupa kumpulan kata, maupun tindakan dan selebihnya data tambahan untuk memperkaya data peneliti (Lofland, Moloeng, 2000: 112). Dalam

penggunaan sumber data dalam penelitian kali ini, terfapat dua sumber data yatu sumber data primer dan data sekunder.

1.6.4.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dalam proses penelitian, data primer yang diperoleh dalam penelitian berupa hasil dari proses wawancara dari informan dan narasumber terkait (Sugiyono, 2015). Selain itu, data primer juga dapat berasal dari observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai fenomena dan problematika sosial yang terjadi di lokasi penelitian secara langsung. Data primer bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan dan problematika di lokasi penelitian. Dalam hal ini, data primer yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari pihak Pemerintah Desa Sendangdalem, Perangkat Desa, Pokdarwis dan masyarakat Desa Sendandalem. Informasi yang diperoleh dari informan tersebut akan menjadi data primer untuk menjawab topik pengelolaan desa wisata berbasis komunitas di Desa Sendangdalem.

1.6.4.2 Data Sekunder

Selain menggunakan data primer dalam proses pengumpulan data dari penelitian ini, data sekunder juga dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian kali ini. Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung. Data sekunder digunakan untuk memperkaya data peneliti agar tidak terjadi bias data. Dalam penelitian ini, data sekunder di dapatkan dari buku, jurnal, serta penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik peneliti. Selain itu, dokumen, arsip, dan gambar pendukung dari pemerintah desa atau instansi terkait Desa Sendangdalem. Kemudian, dapat diperoleh juga melalui media cetak dan situs-situs resmi dari instansi terkait dari penelitian ini.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam mendapatkan berbagai data yang dibutuhkan pada saat proses penelitian. Teknik pengambilan data termasuk langkah yang stretegis dalam penelitian,

karena tujuan utamanya yaitu mendapatkan data (Sugiyono, 2013: 224). Pada penelitian ini, memakai teknik data triangulasi, yaitu teknik dalam mengumpulkan data yang bersifat kombinasi dari berbagai teknik pengumpulan data dengan sumber data yang diperolehnya (Sugiyono. 2013: 241). Dalam proses penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan penjelasan sebagai berikut.

1.6.5.1 Observasi

Observasi menurut Nasution (1998) dalam (Sugiyono, 2015) ialah dasar semua ilmu pengetahuan. Para peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data yang diperoleh, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan, fenomena, atau permasalahan sosial yang diperoleh melalui observasi. Observasi juga dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data secara langsung di lapangan, peneliti mengamati dan mencatat fenomena sosial yang terjadi di lapangan sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Dalam pelaksanaan observasi, terkait dengan topik penelitian yang dibahas, maka ruang lingkup peneliti meliputi pengelolaan desa wisata berbasis komunitas di Desa Sendangdalem. Dalam hal ini, yang diamati oleh peneliti yaitu Pemerintah Desa Sendangdalem, Perangkat Desa, pokdarwis serta masyarakat desa yang terlibat di dalam pengelolaan desa wisata.

1.6.5.2 Wawancara

Wawancara menurut Esterberg (2002) dalam (Sugiyono, 2015) didefinisikan sebagai berikut “ *a meeting of two person to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic.* Maka, wawancara ialah proses penggalan data dengan melakukan dialog atau komunikasi antara peneliti dengan informan atau narasumber dalam upaya untuk mencari data yang dibutuhkan. Wawancara dapat dikatakan sebagai proses pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber terkait fenomena atau problematika yang sedang diteliti. Data yang diperoleh dari

wawancara berupa jawaban dari informan yang diberikan oleh peneliti.

Menurut pendapat (Lexy J. Moleong, 2002) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Sehingga wawancara dalam penelitian tidak hanya obrolan tanpa arah antara peneliti dengan informan, melainkan suatu proses penggalian informasi untuk memperoleh jawaban terkait fenomena yang sedang digali. Seorang pewawancara atau peneliti tidak hanya sekadar memberikan pertanyaan kepada informan, lebih dari itu harus mampu memperoleh informasi mendalam terkait pengalaman hidup dari informan secara mendalam (Moleong, 2000). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap Kepala Desa Sendangdalem, perangkat desa, pokdarwis dan masyarakat Desa Sendangdalem. Lebih jauh, untuk memperkaya data, tidak menutup kemungkinan terjadi snowball selama proses wawancara.

1.6.5.3 Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu proses mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Sadikin, 2015). Terkait dengan penelitian ini dalam melakukan pencarian data, terkait Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Komunitas di Desa Sendangdalem. Peneliti mencari data berupa arsip, dokumen tulisan serta gambar pendukung yang berkaitan dengan topik di Desa Sendangdalem. Studi dokumen bertujuan untuk melengkapi, mendukung dan meningkatkan kredibilitas teknik pengumpulan data sebelumnya (Sugiyono, 2013: 240)

1.6.5.3 Studi Pustaka

Studi Pustaka digunakan sebagai penunjang dari data primer yang telah diperoleh dalam proses wawancara dan observasi. Hal ini bertujuan untuk menemukan informasi yang lebih lengkap dan komprehensif. Studi Pustaka meliputi buku, jurnal, penelitian terdahulu, literatur terkait dengan penelitian dan lain sebagainya. Menurut (Sugiyono (2015) studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan

nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang sedang diteliti. Studi pustaka terkait dengan Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Komunitas di Desa Sendangdalem dapat diperoleh melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan literatur terkait sesuai dengan topik, fenomena dan problematika penelitian tersebut.

1.6.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dalam (Sugiyono,2015) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari.

Analisis data menurut Patton (Moleong, 2002) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Bogdan dan Taylor (Moleong, 2002) mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Teknis analisis merupakan proses pengumpulan informasi yang telah didapatkan yang disusun secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan. Analisis data pada dasarnya merupakan keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dari awal untuk menjawab fenomena sosial yang sedang diteliti. Tetapi, dalam penelitian kualitatif, difokuskan pada proses pengumpulan data di lapangan. Menurut (Sugiyono (2015), dijelaskan bahwa ketika melakukan teknis tersebut, dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Dalam hal tersebut, dijelaskan tiga alur proses kegiatan dalam penelitian kualitatif, diantaranya:

1.6.6.1 Reduksi Data

Reduksi data menurut (Sugiyono, 2015) berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal

yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari hal-hal baru apabila diperlukan. Dalam melakukan reduksi data, peneliti harus berpegang pada tujuan yang akan dicapai. Sehingga peneliti ketika menemukan sesuatu yang dianggap asing, belum diketahui polanya maka hal tersebut harus menjadi atensi dari peneliti dalam proses mereduksi data.

1.6.6.2 Penyajian Data

Tahapan selanjutnya adalah penyajian data, data yang telah diolah disusun secara sistematis dalam bentuk table, matriks, charst atau grafik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada peneliti dalam memberikan pemahaman yang mendalam. Dalam menampilkan data penelitian kualitatif harus disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara variable, *flowchart* dan sebagainya. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013: 249) menyebutkan “*the most frequent form of display data for qualitative research data int the past has been narrative tex*”. Dalam kutipan tersebut, yang dimaksud yaitu dalam menyajikan data kualitatif menggunakan teks yang bersifat naratif.

1.6.6.3 Penarikan Kesimpulan

Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir, dimana menjawab dari pertanyaan atas fenomena dan problematika yang diteliti. Data yang telah disusun dikaitkan untuk menemukan benang merah dengan pola, model, hubungan sebab akibat dan persamaan dari penelitian terdahulu yang muncul dari penelitian. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan substansial dan mendalam. Pada dasarnya dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan di awal penelitian, tetapi dapat juga tidak terjawab. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan fenomena dilapangan ketika melakukan penelitian. Akan tetapi, apabila kesimpulan dapat didukung dengan bukti-bukti yang valid serta tidak mengalami perubahan dikala

peneliti kembali ke lapangan saat pengumpulan data, maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kredibel. Penyajian data yang didukung oleh bukti yang berbobot dapat dijadikan alasan untuk menjadikan kesimpulan penelitian tersebut valid atau kredibel.

1.6.7 Kualitas Data

Guna memperoleh data yang relevan dan faktual, maka diperlukan suatu upaya untuk menguji keabsahan suatu data. Tujuan dari pengujian keabsahan data yaitu agar setiap data yang diperoleh memiliki kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan dalam menguji kualitas dan keabsahan data dalam penelitian adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode pemeriksaan data yang dibutuhkan untuk melakukan pengecekan. Dalam hal ini, yang dimaksud yaitu, untuk mengetahui apakah proses dan hasil yang didapatkan oleh penulis sudah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber.

Berikut ini, merupakan beberapa cara yang dapat penulis lalukan dalam proses implementasi metode triangulasi dalam penelitian:

- 1) Melakukan wawancara secara mendalam terhadap narasumber yang memiliki kapasitas dan pemahaman mengenai pertanyaan peneliti;
- 2) Melakukan uji silang terhadap data yang diperoleh Peneliti melalui wawancara dengan data dari sumber lain yang telah terverifikasi;
- 3) Melakukan konfirmasi terhadap data yang telah diperoleh peneliti kepada narasumber satu dengan narasumber yang lain.